KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Picu Kegaduhan Kelangkaan Minyak Goreng
Tanggal : Jumat, 11 Maret 2022
Surat Kabar : Website DPR
Halaman : 7

Picu Kegaduhan

Kelangkaan Minyak Goreng

JAKARTA, (PR).-

Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan kelangkaan minyak goreng di pasaran sebagai dampak penerapan kebijakan harga eceran tertinggi (HET), bisa berpotensi menimbulkan persoalan ketertiban umum.

"Persoalan minyak goreng yang berkepanjangan bisa menyebabkan masalah baru, yaitu kegaduhan akibat langkanya stok di pasaran. Ini harus segera diatasi karena berpengaruh terhadap ketertiban umum yang bisa berdampak luas," kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis (10/3/2021), seperti dilansir Antara.

Pemerintah menetapkan HET minyak goreng Rp 14.000 per liter setelah kenaikan harga komoditas tersebut menjadi kendala. Seusai penetapan kebijakan itu, stok minyak goreng tiba-tiba langka di pasaran. Masyarakat pun panik.

Di berbagai ritel atau swalayan, masyarakat pun berebut saat ada stok minyak goreng. Puan menilai kejadian seperti itu cukup rawan dari berbagai sisi.

"Di Lubuklinggau kami lihat banyak warga berkerumun, bahkan terjadi keriuhan karena ada operasi pasar murah minyak goreng. Jika kelangkaan minyak goreng terus terjadi, tak hanya bisa memunculkan klaster Covid-19, tapi juga masalah ketertiban umum," ujarnya.

Sementara itu, pemantauan "PR" di Bandung, Kamis (10/3/2022), stok minyak goreng di sejumlah swalayan habis. Di sebuah swalayan di Jalan Buahbatu, warga sudah mengantri sejak pagi. Namun, saat toko dibuka, stok minyak goreng tidak ada. Kondisi serupa terjadi di di sebuah swalayan di Margacinta. Warga kesal dan menyalahkan pemerintah.

Kelangkaan minyak goreng pun menyebabkan berbagai masalah lain, seperti munculnya oknum-oknum yang menjual minyak goreng dicampur air. Lalu, banyak oknum yang menjual minyak goreng dengan harga tinggi.

"Seharusnya kelangkaan minyak goreng tidak terjadi setelah ada penerapan kebijakan *domestic market obligation* (DMO) yang sudah mendistribusikan lebih dari 391 juta liter," ucap Puan.

Dia mengatakan, penyebab kelangkaan minyak goreng tersebut diakibatkan oleh masalah distribusi. Selain itu, juga adanya penyelundupan, baik dijual ke luar negeri atau ke pasar industri.

"Saya meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas para oknum yang memanfaatkan keadaan sehingga membuat minyak goreng semakin langka. Saya juga meminta pemerintah menindak tegas pihak-pihak yang menjual minyak goreng di atas HET," ujarnya.

Tindak tegas

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini meminta pemerintah dan aparat penegak hukum menindak tegas mafia minyak goreng. Itu untuk mengatasi kelangkaan dan tingginya harga.

"Kondisi ini sangat memukul ekonomi rakyat kecil. Belum selesai himpitan ekonomi akibat pandemi, kini harus berhadapan dengan tingginya harga minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok keluarga Indonesia," katanya, Kamis (10/3/2022), seperti dilansir Antara.

Menurut dia, Kemendag sudah mengakui tingginya harga minyak goreng akibat spekulan yang menjual minyak murah untuk industri. Bahkan diselundupkan ke luar negeri dengan harga internasional. Hal itu bukan lagi terkait spekulan, tapi mafia yang jelas menyengsarakan rakyat banyak.

"Kalau Kemendag sudah tahu masalahnya segera ambil kebijakan. Tindak tegas para mafianya, atasi rantai pasokan dan stabilkan harga," katanya. **(Huminca)***